

ISBN 978-979-011-743-3

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



PROSIDING

Temu Ilmiah Nasional Guru IV

"Penguatan Peran Guru dan Kearifan Lokal dalam Globalisasi Pendidikan"

24 November 2012

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Terbuka
2012

“PENGUATAN PERAN GURU DAN KEARIFAN LOKAL DALAM GLOBALISASI PENDIDIKAN”

PROSIDING TEMU ILMIAH NASIONAL GURU IV (TING IV)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan – Universitas Terbuka 2012

Editor:

Ucu Rahayu
Suratinah
Teguh Prakoso
Lidwina Sri Ardiasih
Mery Noviyanti
Sarjiyo
Rahayu Dwi Riyanti
Dodi Sukmayadi
Andayani
Mukti Amini
Heni Safitri
Lis Setiawati

Pembicara Utama dan Pleno

Pembicara Utama:

Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS
(Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Pembicara Pleno:

1. Prof. Dr. Lidya Freyani Hawadi, Psi. (Dirjen PAUDNI)
2. Prof. Dr. Arief Rachman, M.Pd. (Tokoh Pendidikan Indonesia)

Layouter:

Bangun Asmo Darmanto

ISBN 978-979-011-743-3

Penerbit:

Universitas Terbuka
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang
Tangerang Selatan 15418
Website: www.ut.ac.id

MOHON PERHATIAN!
SELURUH ISI MAKALAH DAN SUMBER-SUMBER YANG TERCANTUM PADA
MAKALAH MENJADI TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PENULIS.

Kata Pengantar

Temu Ilmiah Nasional Guru Tahun 2012 ini, adalah wahana bagi guru untuk dapat berkiprah dalam kegiatan ilmiah dengan berbagi pengalaman baik terkait dengan pembelajaran maupun hasil penelitiannya.

Temu ilmiah kali ini merupakan tahun ke-4 yang telah diselenggarakan oleh Universitas Terbuka, tema yang menjadi sentral pembahasan adalah “**Penguatan Peran Guru dan Kearifan lokal dalam Globalisasi Pendidikan**”. Tema ini kami pandang penting untuk dibahas mengingat karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan yang ditandai oleh keberagaman budaya yang masing-masing mengajarkan kearifan lokal dalam berbagai aspek dan sendi kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa. Kearifan lokal merupakan suatu sumber penanaman nilai-nilai norma yang berlaku, seperti jati diri, budi pekerti, sikap toleransi, dan konsep keberagaman yang lebih komprehensif.

Penguatan kearifan lokal penting dilakukan mengingat arus globalisasi yang membawa perangkat dan nilai serta norma baru dengan deras melanda seluruh wilayah dunia, termasuk tentunya wilayah NKRI. Dalam proses penguatan kearifan lokal tersebut kiranya peran guru tentu sangat strategis mengingat posisi mereka yang berada di garis depan dalam proses pendidikan dan pembinaan generasi muda. Oleh karena itu, peran guru pun perlu dikuatkan dalam rangka kita menghadapi dan memanfaatkan globalisasi pendidikan dewasa ini.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para guru khususnya dan teman-teman dosen yang telah menyampaikan makalah untuk dibahas dalam Temu Ilmiah Nasional Guru kali ini. Semoga karya ilmiah yang telah disajikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang lebih luas.

Terima kasih.

Pondok Cabe, 24 November 2012
Rektor Universitas Terbuka,

Ttd

Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D.

NIP 19620401 198601 2 001

Daftar Isi

Kata Pengantar dari Rektor UT	1
Daftar Isi	2

I. MAKALAH PRESENTASI

No	Judul Makalah	Hal
1.	PERAN GURU DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI KEARIFAN LOKAL DAN OLAHRAGA (Mahyudin dan Amril Latif)	12
2.	PEMBELAJARAN KOOPERATIF DAN MODEL PEMBELAJARAN BAGAS: UPAYA PENINGKATAN PRESTASI DALAM KEGIATAN BELAJAR PARA GURU (Suparti)	21
3.	KEARIFAN LOKAL DALAM SASTRA LISAN SEBAGAI MATERI PEMBELAJARAN KARAKTER DI SEKOLAH DASAR (Barokah Widuroyekti)	31
4.	PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI KARYA KESENIAN MELINTING YANG DIPERGUNAKAN GURU DALAM PEMBELAJARAN (Hermansyah)	40
5.	GURU DAN COMPUTER-MEDIATED-COMMUNICATION (CMC) DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI KEARIFAN LOKAL (Sri Sedyaningsih)	49
6.	INDIGINASI SENI DALAM PEMBELAJARAN IPA-FISIKADI ERA MODERNISASI DAN KEARIFAN LOKAL (STUDI PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BIOLOGI, KIMIA, FISIKA, DAN MATEMATIKA DI SEKOLAH) (Mujadi)	58
7.	PERAN GURU PADA KEARIFAN LOKAL SISWA KURANG MAMPU DI SEKOLAH AGAMA JAKARTA (Yasir Riady dan Noorina Hartati)	69
8.	MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI METODE TUTOR SEBAYA BERBASIS KEARIFAN LOKAL (Enta Hermaili)	76
9.	PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL BUDAYA JAWA DALAM ERA GLOBALISASI (Supriyono)	85
10.	GLOBALISASI DAN TANTANGAN DUNIA PENDIDIKAN: IKHTIAR MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB (Hamzah Fansuri)	92

No	Judul Makalah	Hal
11.	KEARIFAN LOKAL DALAM TATANAN ADAT ISTIADAT MASYARAKAT GAYO ACEH (Mariana G)	101
12.	PENDIDIKAN HARMONI: PENGALAMAN IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA MENDASARKAN PADA KEARIFAN LOKAL DI SEKOLAH DASAR KOTA PALU DAN KABUPATEN POSO (Asep Mahpudz)	113
13.	PEMALI JEMBATAN BUDI PEKERTI (Napolion)	120
14.	MUATAN KEARIFAN LOKAL MELALUI PBL PADA PEMODELAN MATEMATIS (Fatia Fatimah dan Andriyansah)	146
15.	NILAI-NILAI IRIYANTI EDUKASI DALAM TRADISI LISAN MASYARAKAT BANJAR (Zulfa Jamalie, Dessy Noor Ariani, dan Desi Ariyanti Eka Saputri)	155
16.	PERAN GURU : ANTARA TRANSFORMASI PENDIDIKAN DAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL (Budi Wibawanta)	162
17.	DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL (Sutan Saribumi Pohan dan Untung Pramono)	169
18.	MODERNISASI DENGAN KEARIFAN LOKAL KESENIAN BANYUWANGI (Ika Triana Fauziana)	180
19.	PERAN GURU DALAM MEMAKNAI KEARIFAN LOKAL PADA KEGIATAN PENDIDIKAN DASAR (Sri Surtini dan Nurmawati)	189
20.	MEMBENTUK KARAKTER CINTA BUDAYA INDONESIA MELALUI PEMBELAJARAN MATEMATIKA YANG BERORIENTASI PADA KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN REMBANG (Nurmawati dan Sri Surtini)	198
21.	GOTONG ROYONG SEBAGAI SALAH SATU KEARIFAN LOKAL DI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS (Edi Prayitno)	209
22.	PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI NILAI-NILAI BUDAYA REOG DI KABUPATEN MADIUN (Abdul malik)	218
23.	PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI TARI DHUNGKREK DI KABUPATEN MADIUN (Mamik Sumarmi)	227
24.	OPTIMALISASI PERAN GURU DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI MODEL MENGUCAPKAN SALAM SECARA SPONTAN PADA ANAK USIA DINI (STUDI DI KB/TK ISLAM AL-AZHAR 21 PONTIANAK) (Diana Ekarini dan Siti Salechah)	238

No	Judul Makalah	Hal
25.	MELATIH KESABARAN, KEJUJURAN DAN SPORTIVITAS MELALUI PERMAINAN DAKON / CONGKLAK (Maryati)	251
26.	DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP EKISTENSI BATIK TULIS DESA PUNGSARI KECAMATAN PLUPUH SRAGEN (Muh Dawam)	258
27.	PENERAPAN KONSEKUENSI PERILAKU UNTUK MENINGKATKAN SIKAP MENGHORMATI ORANG LAIN PADA SISWA KELAS I SD (Jessica Levina)	265
28.	PERAN GURU DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA MELALUI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL (Musa S. Tarigan)	275
29.	PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK USIA SEKOLAH MELALUI KEARIFAN LOKAL (Sukiniarti)	285
30.	GLOBALISASI VS KEARIFAN LOKAL: KREATIVITAS DAGADU MENYIKAPI GLOBALISASI DENGAN KEARIFAN LOKAL (Irsanti Widuri Asih)	297
31.	PERAN GURU SEKOLAH DASAR DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA MELALUI KETELADANAN UNTUK MENCAPAI PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS (Darminah)	312
32.	KEARIFAN LOKAL TENTANG TINDAK TUTUR MERUPAKAN SUMBANGSIH PEMBELAJARAN PRAGMATIK (Ratu Badriyah dan Tri Wahyuni Munindrati)	322
33.	SAMBATAN MERUPAKAN SALAH SATU PENGUAT KARAKTER BANGSA (Sri Sumiyati)	331
34.	UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA BAGI SISWA SMP NEGERI 19 SAMARINDA MELALUI PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI KELAS (Yunianto Hendrawardhana)	336
35.	PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI BAHAN AJAR GELOMBANG BUNYI BERBASIS ALAT MUSIK TRADISIONAL BETAWI PADA MATA PELAJARAN FISIKA KELAS XII (Intan Irawati)	347
36.	POTENSI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SUKU BADUY SUATU BENTUK PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP (Tri Wahyuningsih)	355
37.	UPAYA PENGUATAN NILAI BAGI PESERTA DIDIK DI ERA GLOBALISASI (Rian Sri Rahayu)	362

No	Judul Makalah	Hal
38.	NILAI-NILAI SUNDA CAGEUR, BAGEUR, BENER, PINTER TUR SINGER DALAM MODEL BIMBINGAN DAN KONSELING KECAKAPAN HIDUP (<i>LIFE SKILLS</i>) UNTUK MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN SISWA DALAM MENGELOLA STRES (Firman R. Nur Iman)	368
39.	SILIH ASAHI, SILIH ASIH, SILIH ASUH UNTUK MENINGKATKAN PERILAKU PROSOSIAL ANAK USIA DINI (Firsty Wildaniah)	378
40.	TEMBANG MACAPAT SEBAGAI SUMBER KEARIFAN LOKAL DALAM MEMBANGUN KARAKTER ANAK (Mukti Amini)	386
41.	STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL (Tati Rajati)	398
42.	PENGUATAN KUALITAS NILAI KEARIFAN LOKAL MELALUI MEDIA BACA SISWA (Hascaryo Pramudibyanto)	405
43.	PERAN GURU PKN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI KEARIFAN LOKAL : SUATU ALTERNATIF PENDIDIKAN NILAI SOSIO PEDAGOGIS (Kusnadi)	412
44.	PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBASIS KEARIFAN LOKAL (Tri Wahyuningsih dan Leonard R.H.)	423
45.	PEMBENTUKAN WATAK MELALUI PERIBAHASA (B. Esti Pramuki)	434
46.	MERAJUT PENDIDIKAN IPS DALAM KELUARGA, UNTUK MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN SECARA INTEGRALISTIK KEARIFAN LOKAL (STUDI KASUS DI SD CIAMIS) (Suhartono dan Sriyanto)	439
47.	PERAN GURU DALAM MEMELIHARA KEARIFAN LOKAL DI TENGAH MODERNISASI MELALUI PEMBALAJARAN SENI DAN OLAHRAGA (Agus Tatang Sopandi dan Sudarwo)	450
48.	PERANAN DONGENG-DONGENG INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK PADA PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SD (Sylvia Primulawati Soetantyo)	459
49.	PENYULUHAN PERTANIAN: PENDIDIKAN YANG MENGUSUNG PRINSIP KEARIFAN LOKAL (Pepi Rospina)	467
50.	PENDIDIKAN BAGI PETANI MELALUI PENDEKATAN KELOMPOK: SUATU PENDEKATAN YANG MEMANFAATKAN KEARIFAN LOKAL (Idha Farida)	475

No	Judul Makalah	Hal
51.	MEMBANGUN MASYARAKAT HARMONIS BERBASIS KEARIFAN LOKAL: DARI KESERAGAMAN MENUJU KEBERAGAMAN (Pardamean Daulay)	484
52.	IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DENGAN PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR DI ERA GLOBALISASI (Tita Rosita dan Sri Sumiyati)	493
53.	MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL SUNDA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK (Mery Noviyanti)	502
54.	PERAN GURU DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI KEGIATAN PENGENALAN BUDAYA NYATA (Andrisyah dan Sri Tatminingsih)	509
55.	MENANAMKAN NILAI MORAL MELALUI DONGENG (Arini Noor Izzati)	517
56.	PERAN GURU MENANAMKAN NILAI KEARIFAN LOKAL DI ERA GLOBALISASI (Izal Muslim)	524
57.	OPTIMALISASI PERAN GURU DALAM PEMBINAAN KARAKTER DAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI BERBASIS KEARIFAN LOKAL MELALUI KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI SISWA KELAS VIII DI SMP NEGERI 68 JAKARTA (Haryanti)	537
58.	METODE BERCERITA SEBAGAI USAHA TRANSFORMASI BUDAYA PADA ANAK USIA DINI (Wing Hayom Sari)	548
59.	PENINGKATAN PERKEMBANGAN KEMAMPUAN BERBAHASA SISWA TK MELALUI METODE <i>SHOW AND TELL</i> (Ling Ling)	553
60.	MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL “ENGGLEK” (Yulinda Kusumaningrum)	561
61.	METODE PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA ANAK USIA DINI (Dorothy)	566
62.	MENINGKATKAN KOSAKATA SISWA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS MELALUI KARUME (Ribka Padang)	576
63.	MENINGKATKAN KEMAMPUAN KETERAMPILAN BERBICARA SISWA MELALUI BERCERITA TENTANG CERITA TRADISIONAL TORAJA (ULELEAN PARE TORAYA) (Berthyna Adherline Tukkeng)	582

II. MAKALAH POSTER

No	Judul Makalah	Hal
1.	BUKU TEKS SEBAGAI PSYCHOLOGICAL TOOL PROSES ENKULTURASI DAN PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL (Mohammad Imam Farisi)	592
2.	PERAN GURU DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI KEARIFAN LOKAL (Suparman)	600
3.	DAMPAK GLOBALISASI PENDIDIKAN TERHADAP PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL (Mohammad Harijanto)	611
4.	MENGGUGAH KESADARAN GURU DALAM PELESTERIAN KEARIFAN LOKAL PADA ERA GLOBALISASI (Wuwuh Asrining Surasmi)	620
5.	PERAN GURU DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK BANGSA MELALUI KEARIFAN LOKAL YANG TERCERMIN DALAM UNGKAPAN BAHASA JAWA (Suhartono)	29
6.	WAYANG SEBAGAI ALAT PEMBENTUK KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI DONGENG KESEHARIAN DALAM PBM (Margaretha Sri Sukarti)	637
7.	KEARIFAN LOKAL SEBAGAI PERWUJUDAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT PADA ERA GLOBALISASI (Suyatno)	644
8.	PERAN GURU DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI KEARIFAN LOKAL (Alpiyanto, Sri Hamda, Juhriyansyah Dalle)	654
9.	PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN MADANI MELALUI PEMBERDAYAAN KEARIFAN LOKAL BAHASA MADURA (Sulistiyono)	664
10.	IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI KEARIFAN LOKAL JAWA (Lusi Rachmiazasi Masduki dan Enny Dwi Lestariningsih)	671
11.	TEKNIK PEMBELAJARAN “PINTER” DENGAN PEMANFAATAN KEARIFAN LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA (INTRODUCING PEOPLE) SISWA KELAS VII SMP (Binti Muflikah)	678
12.	PENGGUNAAN BAHASA JAWA DIALEK BANYUMAS DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK (Tri Rahayu, RPH)	686
13.	IMPLIKASI KEARIFAN LOKAL DALAM GLOBALISASI PENDIDIKAN (Tukimin Pramono)	692

No	Judul Makalah	Hal
14.	MENANAMKAN ARTI PENTINGNYA PEMAHAMAN BUDAYA LOKAL SEBAGAI UPAYA MENGHADAPI PENGARUH BUDAYA ASING (Sudilah)	702
15.	MEMBANGUN KARAKTER BERWAWASAN KEARIFAN LOKAL MELALUI PITUTUR DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH (Sukardi Ks.)	710
16.	MEMBANGUN SINERGI KEARIFAN LOKAL MELALUI BERBICARA DALAM BAHASA INGGRIS DENGAN TEKNIK KWL (KNOW, WHAT TO KNOW, LEARNED) DAN PERMAINANN BAHASA PADA SISWA SEKOLAH DASAR (Djoko Sri Bimo)	718
17.	PERAN GURU DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA MELALUI KEARIFAN LOKAL (Suparman)	725
18.	PERAN GURU DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI KEARIFAN LOKAL (Abdul Latif)	733
19.	MENUMBUHKAN KEARIFAN LOKAL PADA ANAK USIA DINI MELALUI PENDIDIKAN NILAI (Titik Setyowati)	745
20.	UPAYA GURU MENINGKATKAN KREATIVITAS ANAK TK DALAM PEMBELAJARAN MELALUI 'APE' DI ERA GLOBALISAS (Sri Kadarwati dan Drs.Joko Setiyanto)	754
21.	BUDAYA RASULAN SEBAGAI WUJUD KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA DALAM ERA GLOBALISASI (Anastasia Siti Nurhayati)	765
22.	PERANAN BAHASA JAWA DALAM PEMBINAAN BUDI PEKERTI GENERASI MUDA (Martono)	773
23.	PEMANFAATAN KEARIFAN LOKAL UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SISWA MELALUI PEMBELAJARAN IPS (Aini Indriasih, Sholikul Waji DP. dan Sri Handayani)	780
24.	PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI NILAI-NILAI PENCAK SILAT (Agus Prastyana)	786
25.	PEMBELAJARAN FISIKA TENTANG GELOMBANG DAN BUNYI DENGAN MEMANFAATKAN BUDAYA LOKAL SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK (Widiasih & Herawati)	792
26.	NYADRAN SEBAGAI BENTUK SEMANGAT KEBERSAMAAN, KEPEMIMPINAN DAN DEMOKRASI (Suripto & Untung Laksana Budi)	801

No	Judul Makalah	Hal
27.	INTEGRASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBELAJARAN SEKOLAH DASAR DI INDONESIA DAN DI JEPANG UNTUK MEMPERTAHANKAN IDENTITAS KEBANGSAAN DI TENGAH DERASNYA ARUS GLOBALISASI (Andik Hadi Mustika)	805
28.	MENUMBUHKAN KARAKTER MAHASISWA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PRAKTIK BERTUTORIAL DI DAERAH TANPA JARINGAN INTERNET (STUDI KASUS DI WILAYAH KERJA UPBJJ-UT PALU, SULAWESI TENGAH) (Sugit Zulianto)	815

231

**MEMBANGUN MASYARAKAT HARMONIS BERBASIS KEARIFAN
LOKAL: DARI KESERAGAMAN MENUJU KEBERAGAMAN**

Pardamean Daulay, S.Sos., M.Si

FISIP UT- UPBJJ Surabaya

pardameandaulay@ut.ac.id

Sub tema:

Peran guru dalam pembentukan karakter peserta didik melalui kearifan lokal

Abstrak

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses upaya terencana yang ditujukan bagi perbaikan dan kemaslahatan masyarakat secara berkeadilan. Hal itu tentunya mutlak memerlukan prasyarat keterbukaan dan kemauan politik dengan mengakomodasi pendekatan sosial budaya. Namun, dalam prakteknya justru menjadi problematis ketika pembangunan yang ditempuh pemerintah Orde Baru

mengabaikan pendekatan sosial budaya dan partisipasi masyarakat lokal. Kekuasaan Orde Baru tidak saja menjalankan kebijakan sentralisasi dan membentuk budaya nasional (national culture), tetapi juga menenggelamkan kearifan lokal yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat dengan memaksakan keseragaman atas nama persatuan dan kesatuan. Akibatnya, bukan saja program dan tujuan yang tidak tercapai, tetapi malah banyak menimbulkan konflik SARA yang berkepanjangan dan hingga saat ini eksisnya masih terasa. Sebenarnya penerapan Otonomi Daerah di satu sisi dimaknai sebagai upaya membangunkan kembali kearifan lokal (local wisdom) yang selama ini hilang dari masyarakat Indonesia. Hanya saja, tumbuhnya spirit lokalitas ini dihadapkan dengan sebuah tantangan besar dengan semakin derasnya arus perubahan dan kuatnya dampak globalisasi yang mendorong intensifikasi hubungan sosial global yang menghubungkan komunitas lokal sehingga peristiwa yang terjadi di kawasan yang jauh dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di suatu tempat yang jauh. Tidaklah mengherankan dalam praktek otonomi daerah terlihat adanya keinginan setiap daerah untuk membangun dirinya sendiri. Tulisan ini mencoba memberikan perspektif lain mengenai pembangunan masyarakat yang harmonis dalam era otonomi daerah yang berwawasan lokal (local views) dengan mencoba memupuk kembali semangat multikulturalisme di tengah masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : masyarakat harmonis, kearifan lokal, pendidikan multikulturalisme

Salah satu arus pemikiran yang semakin naik popularitasnya di kalangan ilmuwan sosial-budaya di Indonesia saat ini adalah kesadaran perlunya kearifan lokal dalam membentuk karakter bangsa, setidaknya demikian salah satu hasil rekomendasi dari Kongres Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) yang baru-baru ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), pada tanggal 19 – 20 Oktober 2012. Barangkali rekomendasi tersebut cukup tepat, mengingat Indonesia adalah negeri yang kaya raya baik sumber daya alam maupun budaya, dimana setiap daerah memiliki nilai-nilai luhur yang disebut kearifan lokal yaitu sebagai perangkat pengetahuan dan praktik suatu komunitas, baik berasal dari generasi sebelumnya maupun pengalamannya berhubungan dengan lingkungan untuk menyelesaikan persoalan dan kesulitan yang dihadapi (Adimihardja, 1999). Namun, justru menjadi problematis ketika pembangunan yang ditempuh pemerintah orde baru pada saat itu, pendekatan sosial budaya diabaikan. Kekuasaan orde baru tidak saja menjalankan kebijakan sentralisasi dan membentuk budaya nasional (*national culture*), tetapi juga menenggelamkan kearifan lokal dengan memaksakan keseragaman dan menghindari keberagaman.

Perubahan paradigma kekuasaan berbasis daerah melalui kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004, sebenarnya memberikan nafas baru dalam upaya membangkitkan kembali budaya lokal berupa spirit lokalitas, pengembalian martabat dan harga diri masyarakat lokal, dan membingkai kembali masyarakat Indonesia yang majemuk dan membiarkan berkembangnya keberagaman. Dengan demikian, otonomi daerah dalam satu segi bisa dimaknai sebagai upaya untuk membangunkan kembali kearifan lokal (*local wisdom*) yang selama ini hilang dari masyarakat Indonesia yang multikultural. Namun pada kenyataannya, justru otonomi daerah cenderung menjadi beban dari pada modal untuk membangun masyarakat multikultural yang harmonis. Hal ini dapat diamati dari menurunnya toleransi masyarakat terhadap perbedaan, adanya pemahaman yang sempit akan makna “lokalitas” yang dikemas dalam kosa kata “putra daerah”, munculnya penguasa atau raja-raja kecil, dan menipisnya tingkat saling percaya (*mutual trust*) dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, berbagai masalah yang sumbernya berbau kemajemukan, seperti kerusakan yang terjadi baru-baru ini di Sampang Madura, terorisme, konflik antar desa di Lampung Selatan dan permasalahan konflik yang disebabkan mengenai etnisitas dan identitas budaya, menambah banyak catatan kasus yang disebabkan kesalahan dalam memaknai arti kemajemukan bangsa. Bahkan sepanjang 2011,

menurut beberapa pemberitaan media massa, setidaknya ada 36 kasus yang diduga berlatar belakang agama terjadi di 14 provinsi di Indonesia. Angka tersebut hanya menunjukkan permasalahan ibadah belum mencakup semua permasalahan yang dipicu oleh mispersepsi dan miskomunikasi antar umat beragama (Republika, 2012).

Berbagai kerusuhan, konflik, dan amuk massa yang berkembang akhir-akhir ini menuntut kita untuk memulai upaya-upaya baru, yakni dengan mentransformasikan paradigma kemajemukan dan multikulturalisme kedalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di era otonomi daerah. Dalam hal ini, benteng terkuat untuk menangkal segala bentuk baik ancaman maupun pandangan yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bangsa tersebut tentu dengan pendidikan yang tetap berpegang teguh pada pandangan hidup bangsa Indonesia. Makalah ini mencoba memberikan perspektif lain mengenai pembangunan masyarakat yang harmonis dalam era otonomi daerah yang berwawasan lokal (*lokal views*) dengan mencoba memupuk kembali semangat multikulturalisme di tengah masyarakat Indonesia.

Realitas Multikultural Masyarakat Indonesia

Pemahaman serta kesadaran tentang multikulturalisme, sebenarnya sudah muncul sejak negara Republik Indonesia terbentuk yang digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia untuk ”mendisain kebudayaan bangsa Indonesia. Paling tidak, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat memperlihatkan bahwa sebenarnya Indonesia adalah negara multikultural yang dikomposisikan oleh banyak suku bangsa. Mengelola banyak suku bangsa dalam satu *flatfom* negara kesatuan tentu saja tidak mudah, apalagi mengingat tidak semua suku bangsa di Indonesia mempunyai pengalaman kesejarahan yang sama. Wajar saja, jika konflik vertikal dan horizontal masih kerap terjadi, bahkan bersifat laten, dan hal ini sekaligus mengisyaratkan bahwa pluralitas di Indonesia belum berada pada taraf multikultural. Pertanyaannya adalah apakah hal ini semata-mata dikarenakan sentimen primordial memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi Indonesia atau ada kesalahan pengelolaan sehingga sentiment primordial sangat gampang tersulut dan berkobar menjadi konflik?

Satu hal penting, yang sebenarnya sudah disadari bersama, yang memicu konflik di Indonesia adalah penerapan kebijakan pemerintah melalui slogan pembangunan. Terkadang program pembangunan yang didasarkan pada pencapaian target tidak benar-benar mengacu pada kajian komprehensif terhadap kesiapan masyarakat dan efek lanjut dari program tersebut. Berbagai konflik yang muncul dalam bentuk konflik SARA ditengarahi memiliki akar masalah pada penerapan kebijakan pembangunan yang berimbas pada terbentuknya kesenjangan sosial ekonomi yang kronis dan akumulatif (Budiwati, 2011). Dalam melihat fenomena kemajemukan masyarakat Indonesia sejak Orde Baru, Magenda dalam Sitorus (1998) mengemukakan bahwa untuk mencegah terjadinya perang aliran pemerintah Orde Baru menerapkan manajemen SARA (Suku, Agama, Ras, dan Adat). Pemerintah Orde Baru berhasil membentuk orde religius diantara agama-agama yang ada di Indonesia. Orde religius semakin adaptif terhadap integrasi yang didukung oleh peranan institusi agama yang ditetapkan dalam suatu wadah yang kaku seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), PGI (Persekutuan Gereja di Indonesia), KWI, Parishada Hindu Indonesia dan Walubi. Selain itu, dari segi kultural, pemerintah berhasil menerapkan pembelahan kultur, dimana pada masyarakat Jawa identik dengan suku Jawa, sedangkan pada banyak suku, agama dijadikan sebagai identitas suku, sehingga terjadilah agama suku. Dalam hal ini, menjadi orang Melayu identik dengan beragama Islam, sedangkan suku Batak Toba dan Minahasa, walaupun berasal

dari daerah yang berbeda, tetapi memiliki identitas yang sama yaitu beragama Kristen. Demikian pula masyarakat Bali, yang kaya ritual dan kultur etniknya merupakan agregat sosial yang memeluk agama Hindu.

Di samping itu, atas nama program pembangunan, kearifan lokal yang menjadi penyangga utama masyarakat lokal di Indonesia dipinggirkan, bahkan dihilangkan. Struktur masyarakat diseragamkan dan pranata hukum dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan tidak mengakomodasi aturan adat yang telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan masyarakat pendukungnya. Menghadapi keadaan ini masyarakat menjadi gamang karena budaya lama yang hilang tidak sepenuhnya tergantikan oleh budaya baru yang datang. Ketika masyarakat lokal gamang dan hilang pijakan, belum tentu ada kebijakan pembangunan yang mengayominya. Contoh nyata adalah keterpinggiran masyarakat perambah dari hutan ulayatnya atas nama pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) oleh orang luar. Masyarakat lokal kehilangan mata pencaharian sementara mereka mulai berkenalan dengan budaya konsumerisme yang dibawa oleh orang luar. Ketiadaan keterampilan yang memadai dan tuntutan kebutuhan membawa mereka pada tindak pencurian kayu. Masyarakat perambah yang dulunya menjadi tuan di tanahnya berubah menjadi pesakitan.

Melihat pada permasalahan yang ada maka rekomendasi utama dalam pengelolaan masyarakat Indonesia yang bersifat plural adalah kemauan politik dari pemegang dan penyelenggara kekuasaan untuk memahami keberagaman budaya dan kesediaan menerima bahwa tidak seharusnya ada kekuasaan primodial yang mendominasi kebijakan pemerintah. Pemerintah, melalui program pembangunan, harus mampu menjadi pengayom bagi semua kelompok masyarakat sehingga otonomi daerah tidak dijadikan ajang bagi balas dendam kekuasaan dengan mengusung slogan “putra daerah”. Kesadaran bahwa Indonesia adalah negara kesatuan harus diikuti dengan penerimaan bahwa siapa saja boleh hidup di mana pun di wilayah Indonesia, asal mampu mengembangkan pola hidup harmonis. Pemahaman multikulturalisme dapat disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia melalui pendidikan multikultural.

Sebelum sampai pada sosialisasi pendidikan multikultural, sebaiknya dijelaskan dulu apa sebenarnya multikultural. Menurut Parsudi Suparlan (2002) akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Sedangkan, Azyumardi Azra (2007), menyatakan multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat majemuk. Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme. Konsep multikulturalisme itu sendiri tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan.

Ciri utama masyarakat majemuk (*plural society*) menurut Furnivall dalam Haryanto dkk (2009) adalah orang yang hidup berdampingan secara fisik, tetapi karena perbedaan sosial mereka terpisah-pisah dan tidak bergabung dalam sebuah unit politik. Furnivall dalam Haryanto dkk (2009) menunjuk masyarakat Indonesia di zaman kolonial sebagai contoh yang klasik. Masyarakat Hindia Belanda waktu itu terpisah-pisah, tidak saja antara kelompok yang memerintah dan yang diperintah dipisahkan oleh ras yang berbeda, tetapi secara fungsional

masyarakatnya terbelah dalam unit-unit ekonomi, antara pedagang Cina, Arab, dan India (*Foreign Asiatic*) dengan kelompok petani Bumi Putera.

Desa Bungabondar: Potret Harmoni Masyarakat Majemuk

Wacana multikulturalisme dan estetika lokal dipahami sebagai sebuah usaha untuk menemukan nilai-nilai lokal (kearifan lokal, atau seperti pandangan Azyumardi Azra yakni *local genius* yang terkandung dalam kebudayaan daerah, seperti misalnya sejarah, bahasa, sistem perniagaan, pandangan hidup, pranata sosial adat, sastra, seni, dan lainnya. Usaha ini muncul tidak lain merupakan bentuk kekhawatiran akan terputusnya tali generasi suatu kebudayaan, bukan dari rasa “dendam” karena telah dimarjinalkan. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural yang ditandai oleh perbedaan suku, agama, ras dan golongan. Sejarah menunjukkan, masing-masing etnis dan suku memiliki kearifan lokal sendiri. Lebih dari itu, masing-masing memiliki keakraban dan keramahan dengan lingkungan alam yang mengitari mereka. Kearifan lokal itu tentu tidak muncul serta-merta, tapi berproses panjang sehingga akhirnya terbukti mengandung kebaikan bagi kehidupan masyarakat yang multikultural.

Setiap masyarakat yang secara internal terikat oleh norma-norma, nilai-nilai, maupun tradisi secara fitrah menginginkan kehidupan kebersamaan dalam mewujudkan suasana aman, tentram, rukun, dan harmonis. Namun, belakangan ini kita dapat menyaksikan tidak semua masyarakat mampu menciptakan kerukunan dan keharmonisan, tetapi sebaliknya cenderung mengarah pada konflik, kerusuhan, amuk massa. Namun, ditengah hiruk pikuk persoalan konflik sosial yang diakibatkan oleh multikultural tersebut, terdapat satu komunitas masyarakat yang memiliki sistem kehidupan sosial budaya yang mencerminkan kebhinekaan agama/kepercayaan, yaitu masyarakat Desa Bungabondar, kecamatan Sipirok, kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat tersebut merupakan etnis Batak, yang menurut Siregar (2008) memiliki banyak nilai kearifan lokal yang mampu menciptakan keharmonisan masyarakat¹.

Kehidupan masyarakat Desa Bungabondar dalam bidang keagamaan sangat sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bagi mereka, ada hal yang penting untuk dipertahankan yaitu kebersamaan. Menjaga nilai-nilai kebersamaan dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat kental dalam setiap warga masyarakat setempat. Masyarakat lebih mengedepankan hidup berdampingan tanpa melihat perbedaan latar belakang agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi mereka perbedaan adalah anugerah dan potensi yang dapat disinergikan. Keutuhan kehidupan harmonis dalam kedamaian hingga saat ini masih tetap dipertahankan. Hal tersebut dapat dilihat ketika ada keluarga yang beragama Islam melakukan hajatan, maka yang membantu menyiapkan makanan (*parhobas*) adalah yang beragama Kristen, demikian sebaliknya. Demikian juga halnya pembangunan Masjid atau Gereja, masyarakat saling membantu untuk pembiayaannya.

Realita kehidupan sosial budaya masyarakat Bungabondar seperti yang diutarakan di atas, menjadi suatu hal yang dianggap unik dan perlu dilestarikan. Kebersamaan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat tersebut dalam keberagaman agama dan kepercayaan menjadi

¹ Nilai kearifan lokal suku Batak dapat diamati dari aturan pola hubungan antara unsur-unsur Dalihan Na Tolu. Diantara wujud hubungan itu adalah saling membantu dalam semua aspek kehidupan, yang diwujudkan dalam tiga bentuk; (1) marsirimpa; bergotong royong dalam mengerjakan fasilitas umum, (2) marsiadapari; saling membantu dalam mengerjakan usaha dengan cara saling tukar tenaga kerja, (3) tumpak; bantuan sukarela dari pihak boru kepada pihak hula-hula (atau sebaliknya) dalam pelaksanaan upacara adat (Siregar, 2008).

fenomena yang dapat dijadikan sebuah model bagaimana mengelola harmoni sosial dalam masyarakat yang multikultural. Pertanyaannya adalah bagaimana memindahkan pola kehidupan harmonis masyarakat Bungabondar ke daerah lainnya di Indonesia? Disinilah posisi kunci seorang guru dalam pembentukan karakter peserta didik melalui kearifan lokal.

Membangun Masyarakat Harmonis Berbasis Kearifan Lokal

Sebelum berbicara panjang lebar mengenai posisi kearifan lokal dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di Indonesia, ada baiknya kita menengok kembali apa makna kearifan lokal itu sendiri. Dalam Kamus Inggris Indonesia, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sartini, 2004). Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Ridwan, 2007). Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi.

Sebagai sebuah istilah *wisdom* sering diartikan sebagai ‘kearifan/kebijaksanaan’. Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama. Proses evolusi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat dapat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan harmonis. Pengertian ini melihat kearifan lokal tidak sekadar sebagai acuan tingkah-laku seseorang, tetapi lebih jauh, yaitu mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh keadaban. Pada akhirnya kearifan lokal dijadikan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka yang meliputi seluruh unsur kehidupan: agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian. Mereka mempunyai pemahaman, program, kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, memperbaiki, mengembangkan unsur kebutuhan mereka, dengan memperhatikan lingkungan dan sumber daya manusia yang terdapat pada warga mereka.

Masyarakat harmonis jika dipahami secara sepintas merupakan format kehidupan sosial yang mengedepankan semangat demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam masyarakat yang harmonis, warga bekerjasama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat *non-govermental* untuk mencapai kebaikan bersama. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran dalam mewujudkan tercapainya masyarakat harmonis, yaitu: 1) terpeliharanya eksistensi agama atau ajaran-ajaran yang ada dalam masyarakat; 2) terpelihara dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan keselamatan; 3) tegaknya kebebasan berpikir yang jernih dan sehat; 4) terbangunnya eksistensi kekeluargaan yang tenang dan tenteram dengan penuh toleransi dan tenggang rasa; 5) terbangunnya kondisi daerah yang demokratis, santun, beradab serta bermoral tinggi; dan 6) terbangunnya profesionalisme aparatur yang tinggi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih berwibawa dan bertanggung jawab.

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, paradigma hubungan dialogal atau pemahaman timbal balik sangat dibutuhkan, untuk mengatasi eksese-eksese negatif dari suatu problem disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, multikulturalisme bukan sekedar mengakui yang berbeda dan lebih merupakan pembedaan yang simetris (*symmetrical differentiated citizenship*) dengan mengakui adanya pluralitas identitas dalam masyarakat. Hal inilah yang mestinya didorong oleh kebijakan Otonomi Daerah dalam rangka mengeliminir munculnya loyalitas sempit atas dasar agama maupun ikatan kesukuan belaka. Selain itu, melalui pluralitas identitas, maka perjuangan kepentingan masyarakat lokal tidak lagi terjebak pada isu-isu primordial dan sektarian yang bisa mengancam harmoni lokal itu sendiri. Implementasi Otonomi Daerah juga meniscayakan pemberian ruang politik dan aspirasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara luas. Prinsip penerimaan dan penghargaan terhadap keberagaman nilai-nilai merupakan pembiakan dari prinsip demokrasi yang tidak saja mendorong terciptanya partisipasi dari dan pemberdayaan bagi semua golongan masyarakat. Akan tetapi pembiakan dari prinsip demokrasi ini juga akan terwujud dalam bentuk mengakui dan menghargai keberagaman budaya serta ide atau pendapat yang saling berbeda maupun mengakui dan menghargai prinsip Otonomi Daerah yang luas dan nyata yaitu keberadaan hak-hak asli daerah dan hak-hak rakyat di daerah.

Kemajemukan (pluralitas) dan keanekaragaman (heterogenitas atau diversitas) masyarakat dan kebudayaan di Indonesia merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan, nilai asli masyarakat Indonesia adalah nilai yang didalamnya melekat dengan konsep multikultural, nilai-nilai seperti toleransi beragama, agregasi sosial, kemajemukan kultural dan etnik, menjadi alasan mengapa para pendiri bangsa ini memilih Pancasila dari pada pada ideologi bernuansa agama. Keniscayaan ini harus kita akui secara jujur, terima dengan lapang dada, kelola dengan cermat, dan jaga dengan penuh rasa syukur; bukan harus kita tolak, abaikan, sesalkan, biarkan, dan diingkari hanya karena kemajemukan dan keanekaragaman itu menimbulkan berbagai eksese negatif, antara lain benturan masyarakat dan kebudayaan lokal di pelbagai tempat di Indonesia.

Potret harmoni sosial yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Bungabondar diatas merupakan demonstrasi suatu model bagaimana pendidikan multikulturalisme itu di jalankan. Masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, kekeluargaan, kerukunan dan kebersamaan sejatinya merupakan karakter masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, panduan utama bagi terciptanya masyarakat Indonesia baru yang majemuk (*plural*) dan beragam budaya (*multicultural*) adalah multikulturalisme. Gambaran masyarakat tersebut semakin menyadarkan kita bahwa pemahaman terhadap multikulturalisme merupakan kebutuhan bagi manusia untuk menghadapi tantangan global di masa mendatang. Dengan demikian, pendidikan multikultural mempunyai dua tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya. Bila kedua tanggung jawab besar itu dapat dicapai, maka kemungkinan disintegrasi bangsa dan munculnya konflik dapat dieliminasi. Disisi lain primordialisme lokal yang berlebihan, fanatisme agama yang terlalu kuat ataupun eksklusivisme daerah yang sering muncul bersamaan dengan lahirnya era otonomi daerah dapat dihindarkan.

Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal: Suatu Tawaran

Kearifan lokal yang digali, dipoles, dikemas dan dipelihara dengan baik bisa berfungsi sebagai alternatif pedoman hidup manusia Indonesia dewasa ini dan dapat digunakan untuk menyaring nilai-nilai baru/asing agar tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa dan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Sang Khalik, alam sekitar, dan sesamanya

(*tripita cipta karana*). Selanjutnya, sebagai bangsa yang besar pemilik dan pewaris sah kebudayaan, bercermin pada kaca benggala kearifan para leluhur dapat menolong kita menemukan posisi yang kokoh di arena global ini. Dalam hal ini, nilai-nilai kearifan lokal, seperti yang tergambar dari masyarakat Desa Bungabondar dapat dijadikan sebagai suatu muatan dalam membangun karakter peserta didik menjadi penting artinya, terutama dalam tujuannya membangun warga negara yang memiliki kesadaran hidup bermasyarakat yang multikultural.

Terkait dengan tujuan membangun masyarakat harmonis berbasis kearifan lokal tersebut, maka tawaran agar pendidikan karakter melalui kearifan lokal agar mulai diperkenalkan oleh guru kepada para siswa. Semua satuan pendidikan siswanya memiliki keberagaman ras maupun agama, dapat menjadi laboratorium masyarakat untuk penerapan pendidikan karakter. Proses interaksi yang melibatkan semua pihak dalam kearifan lokal sama saja mempelajari karakteristik dari materi yang dikaji sehingga siswa secara langsung dapat menggali karakter peristiwa kelokalan tersebut. Kearifan lokal mempunyai arti sangat penting bagi anak didik, karena mereka akan memahami perjuangan nenek moyangnya dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, belajar tentang nilai-nilai kerja keras, pantang mundur, dan tidak kenal menyerah yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia di masa lalu, tetapi perlu diteladani di era globalisasi yang penuh dengan perubahan.

Susanti, (2011) menjelaskan pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu dekat dengan situasi konkrit yang mereka hadapi sehari-hari. Model pendidikan berbasis kearifan lokal ini merupakan sebuah contoh pendidikan yang mempunyai relevansi tinggi bagi kecakapan pengembangan hidup, dengan berpijak pada pemberdayaan keterampilan serta potensi lokal pada tiap-tiap daerah. Pendidikan berbasis kearifan lokal dapat digunakan sebagai media untuk melestarikan potensi masing-masing daerah. Potensi daerah merupakan potensi sumber daya spesifik yang dimiliki suatu daerah tertentu. Oleh karena itu, siswa yang datang ke sekolah tidak bisa diibaratkan sebagai sebuah gelas kosong, yang bisa diisi dengan mudah, tetapi mereka sudah membawa nilai-nilai budaya yang dibawa dari lingkungan keluarga dan masyarakatnya masing-masing. Pendidikan berbasis kearifan lokal tentu akan berhasil apabila guru memahami wawasan kearifan lokal itu sendiri. Guru yang bijaksana harus dapat menyelipkan nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran. Namun, perlu juga dipahami bahwa pendidikan karakter berbasis kearifan lokal belum tentu sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih pada masa otonomi daerah yang baru dilakukan. Apabila hal itu dilaksanakan dengan tidak berhati-hati justru akan menjerumuskan siswa ke dalam perpecahan nasional.

Untuk itulah, disamping memahami kearifan lokal, guru dituntut memahami pendidikan multikultural, dimana tidak sebatas "merayakan keragaman" dan "kebersamaan" belaka. Apalagi tatanan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi yang bersifat rasis, etnis, fanatis terhadap religiusitas. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis kearifan lokal lebih bermakna sebagai proses pendidikan cara hidup, menghormati, tulus, toleransi terhadap keragaman budaya yang hidup ditengah masyarakat plural, sehingga masyarakat kelak memiliki kekenyalan dan kelenturan mental bangsa dalam menyikapi konflik sosial di masyarakat (Hanum, 2005).

PENUTUP

Gagasan multikulturalisme meyakini bahwa keragaman sosial (*diversity*) merupakan suatu kondisi yang tidak terelakan (bukan patologi sosial yang irasional) Membangun semangat multikulturalisme berarti membangun kesetaraan dalam keragaman (*equality in difference*);

dimana proses politik dan aktualisasi dari proses kewarganegaraan merupakan proses dari ekspresi “politik pengakuan” bukan sekedar politik redistribusi. Mengingat pentingnya pemahaman multikulturalisme dalam pembangunan bangsa, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mewujudkannya. Kita perlu menyebarluaskan pemahaman dan mendidik masyarakat akan pentingnya multikulturalisme bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain kita memerlukan pendidikan multikulturalisme yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

Masyarakat Indonesia sudah sepatutnya untuk kembali kepada jati diri mereka melalui pemaknaan kembali dan rekonstruksi nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal. Upaya membangun masyarakat harmonis di era otonomi daerah yang perlu dilakukan adalah menguak makna substantif kearifan lokal, misalnya keterbukaan dikembangkan dan kontekstualisasikan menjadi kejujuran, dan “keseragaman diganti keberagaman”. Pada saat yang sama, hasil rekonstruksi ini perlu dibumikan dan disebarluaskan ke dalam seluruh masyarakat sehingga menjadi identitas kokoh bangsa, bukan sekedar menjadi identitas suku atau masyarakat tertentu. Dalam hal ini, peran dan tanggung jawab guru sangat dibutuhkan untuk mentransfer nilai-nilai kearifan lokal tersebut melalui sebuah tawaran pendidikan karakter berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, “From Civic Education to Multicultural Education: With Reference to the Indonesian Experience,” Paper presented at Workshop” Multicultural Education in Southeast Asian Nations : Sharing Experience, University of Indonesia, Depok 17-19 June 2003.
- Adimihardja, ed. (1999). *Petani Merajut Tradisi Era Globalisasi: Pendayagunaan Sistem Pengetahuan Lokal dalam Pembangunan*, Bandung, Humaniora Utama Press.
- Akhmad SatoriD:\Prosiding B5\6) Prosiding Akhmad Satori (16.h).docx - ftn1, (2012). Merajut Masyarakat Multikultural Dalam Bingkai Otonomi Daerah, diakses dari <http://akhmadsatori.blogspot.com/2012/04/merajut-masyarakat-multikultural-dalam.html>, tanggal 15 September 2012.
- Budiwati, Yulia (2011), Signifikansi Masyarakat Multikultural Bagi Pengembangan Demokrasi, Makalah Disajikan pada Seminar Nasional Demokrasi dan Masyarakat Madani, FISIP – UT, 07 Juli 2011.
- Dadang sudiadi, (2009) Menuju Kehidupan Harmonis Dalam Masyarakat Yang Majemuk: Suatu Pandangan Pentingnya Pendekatan Multikultur Dalam Pendidikan di Indonesia, diakses dari <http://beritasore.com/2009/04/15/membangun-masyarakat-harmonis-dengan-semangat-multikulturalisme/>, 29 Agustus 2012
- Dadang Respati Puguh (2009) Membangun Masyarakat Madani Berbasis Kearifan Lokal diakses dari <http://www.babinrohiskertrans.org/artikel-islam/membangun-masyarakat-madani-berbasis-kearifanlokal-oleh-dadang-respati-puguh>, 29 Agustus 2012.
- Hanum, Farida, 2005, Multikulturalisme dan Pendidikan, diakses <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/farida-hanum-msi-dr/multikulturalisme-dan-pendidikan.pdf>, 9 April 2012.

- Haryanto dkk (2009). Sistem Sosial Budaya Indonesia, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Ridwan, N. A. (2007). Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. *Ibda P3M STAIN Purwokerto Vol 5 No.1* , 27-38.
- Sitorus, Henry (1999). Rekonstruksi Integrasi Sosial Melalui Manajemen SARA, Makalah disajikan dalam Kongres ISI III, Malang, 24 – 26 Pebruari 1999.
- Sartini. (2004). Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati . *Jurnal Filsafat Jilid 37, Nomor 2* , 111.
- Siregar, Parluhutan (2008), Revitalisasi Kerarifan Lokal Batak Toba dalam Memperkuat Kerukunan Umat Beragama, *Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol. VII No. 27 Juli-September 2008*.
- Suparlan, Parsudi. 2002, *Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural*, Makalah, Disajikan pada Simposium Internasional *Jurnal Antropologi Indonesia ke-3*, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002.
- Susanti, Retno L.R. (2011) Membangun pendidikan karakter di sekolah Melalui Kearifan Lokal, makalah disampaikan pada Persidangan Dwitahunan FSUA-PPIK USM pada tanggal 26 s/d 27 Oktober 2011 di Fakultas Sastra Unand, Padang.

233

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DENGAN PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR DI ERA GLOBALISASI

¹Dr. Tita Rosita, M.Pd, ²Dra. Sri Sumiyati, M.Si

¹Dosen FKIP-UT (tita@ut.a.id)

¹Dosen FKIP-UT (oneng@ut.ac.id)

Abstrak

Dampak Globalisasi telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia pada abad ke-21. Globalisasi menuntut adanya perubahan di dalam diri dan pribadi manusia itu sendiri, bagaimana memandang dunia ini sebagai tempat kehidupan yang senantiasa berubah. Masalah yang penting mendapat perhatian adalah identitas kebangsaan karena derasnya arus globalisasi menyebabkan terkikisnya nilai-nilai kebangsaan. Masyarakat pada umumnya lebih bangga dengan budaya asing daripada budaya bangsanya sendiri. Globalisasi akan menghilangkan sekat-sekat budaya satu dengan lainnya. Dalam era ini karakter budaya tentu akan menjadi semakin samar dan tergantikan dengan budaya global yang bersifat umum. Kearifan lokal mengandung arti kearifan (wisdom), dan lokal (local). Secara umum kearifan setempat (local wisdom) dapat diartikan sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan